

# **MEMPERTAHANKAN TEGAKKAN HUTAN**

Evaluasi Merek dan Bank Penyebab  
Deforestasi dan Pelanggaran HAM





# PENGANTAR

Mulai dari udara yang kita hirup hingga air bersih yang kita minum, hutan adalah landasan kehidupan di bumi. Khususnya, hutan Indonesia — kawasan hutan hujan terbesar ketiga di Bumi — yang secara unik berperan penting karena mampu mengurangi krisis iklim dan menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia serta menopang kehidupan jutaan orang yang tinggal di dalam atau sekitarnya.<sup>1</sup> Masyarakat Adat dan masyarakat lokal telah berhasil mengelola hutan Indonesia dari generasi ke generasi. Bahkan beberapa dari mereka menjadi penjaga terbaik untuk melawan deforestasi,<sup>2</sup> melindungi tanah, hutan, dan sumber air mereka, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi untuk kita semua.

Namun, hutan hujan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia setiap hari masih dibakar, ditebang habis, dan dibulldoser untuk komoditas seperti minyak sawit, pulp, kertas, daging sapi, kedelai, kakao, dan produk kayu.<sup>3</sup> Merek-merek multinasional memenuhi permintaan pasar untuk ketersediaan produk-produk ini dengan didukung pendanaan untuk kerusakan yang mengalir dari bank-bank besar di seluruh dunia. Perusahaan merek dan bank seharusnya ikut bertanggung jawab atas dampak yang disebabkan oleh mitra bisnis mereka — para pemasok dan klien yang memproduksi produk ini dan memasarkannya ke seluruh dunia.

Perluasan pertanian industrial ini tidak hanya menjadi salah satu pendorong deforestasi yang paling signifikan, tetapi juga secara nyata bertanggung jawab atas kekerasan yang dihadapi Masyarakat Adat dan lokal. Agribisnis menjadi satu sektor yang bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan para pembela lingkungan, nomor dua setelah pertambangan.<sup>4</sup> Di Indonesia dan di seluruh dunia, Masyarakat Adat berjuang untuk mempertahankan tanah mereka dari kendali perusahaan yang ingin melanggar batas dengan melakukan penebangan skala industri dan agribisnis.

Kerusakan hutan hujan akan membinasakan manusia dan planet ini, memperburuk krisis iklim dan menempatkan spesies yang tak terhitung jumlahnya pada ambang kepunahan. Penelitian juga menunjukkan berbagai contoh adanya keterkaitan antara kerusakan habitat dengan terpaparnya manusia pada penyakit yang ditularkan melalui organisme perantara patogen atau parasit dan penyakit zoonosis — penyakit menular yang ditularkan dari hewan ke manusia.<sup>5</sup> Secara harfiah, menghentikan deforestasi global berarti menghentikan pandemi agar tidak terjadi di masa depan.

**Demi masa depan bersama, kita harus Mempertahankan Tegakkan Hutan dan Menjunjung Hak Masyarakat Adat, dan kita memiliki kekuatan untuk menghentikan kerusakan ini.**

Seorang petani di Lubuk Mandarsah, Provinsi Jambi, Indonesia menggarap lahan pertanian tradisional miliknya. Lahan ini diklaim oleh Asia Pulp and Paper / Sinar Mas Group yang secara aktif merusak tanaman milik masyarakat.  
FOTO: Agusriady Saputra / RAN

## Evaluasi Latar Belakang

Kampanye Mempertahankan Tegakkan Hutan menghimbau beberapa perusahaan paling berpengaruh yang mendorong kerusakan hutan hujan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk mengambil tindakan nyata. Merek-merek tersebut merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen cepat habis seperti **Colgate-Palmolive, Ferrero, Kao, Mars, Mondeléz, Nestlé, Nissin Foods, PepsiCo, Procter & Gamble**, dan **Unilever**. Sedangkan bank-bank yang mendanai merupakan kekuatan finansial dunia seperti **ABN Amro, Bank Negara Indonesia (BNI), CIMB, DBS, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan Chase**, dan **Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)**.

Banyak dari merek-merek dan bank-bank ini telah membuat berbagai komitmen sebelumnya dan mengadopsi kebijakan perusahaan untuk mencapai nol deforestasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan Masyarakat Adat dalam praktik bisnis mereka. Namun terlepas dari janji-janji ini, hutan terus tumbang, ratusan masyarakat menderita akibat hutan dan tanah tradisional mereka dirampas dan dibuka, dan buruh terus mengalami pelecehan. Kampanye Mempertahankan Tegakkan Hutan menuntut lebih dari sekadar janji tertulis. Kami mengevaluasi dan memberikan peringkat pada merek-merek dan bank-bank ini untuk melihat mana yang merupakan Perusak Hutan terbesar.



Jimmy Simanjuntak dari Nagasaribu, Sumatera Utara, berdiri di depan tanah adat milik masyarakat, yang dibuka oleh Toba Pulp Lestari / Royal Golden Eagle. Papan bertuliskan "Tanah ini milik Desa Nagasaribu. Jangan Tanam Eukaliptus."  
FOTO: Agusriady Saputra / RAN

## Hasil Evaluasi Merek dan Bank

Dalam mengevaluasi merek-merek dan bank-bank ini, kami mengajukan lima pertanyaan umum:

- » Sudahkah mereka mengambil langkah pertama dalam mengadopsi kebijakan untuk menghentikan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia dari rantai pasok dan pembiayaan mereka?
- » Apakah mereka secara terbuka mengungkapkan dampak menyeluruh bisnis mereka terhadap hutan dan hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal?
- » Apakah mereka mencegah kekerasan dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dan adat sepenuhnya dihormati?
- » Apakah mereka benar-benar mengubah praktik pembelian atau pembiayaan jika mitra bisnis mereka ditemukan melanggar kebijakan terkait perlindungan hutan dan penegakkan hak asasi manusia?
- » Bisakah mereka membuktikan kepada pelanggan bahwa mitra bisnis mereka mematuhi kebijakan mereka?

	* Kebijakan NDPE	* Lingkup Kebijakan NDPE	* Mandat untuk Mengadopsi Kebijakan NDPE	* Rencana Implementasi NDPE	** Pengungkapan Jejak Hutan	*** Bukti Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan	*** Sistem pemantauan dan uji tuntas yang kuat	*** Nol toleransi untuk tindak kekerasan dan intimidasi	**** Meminta pertanggungjawaban perusahaan nakal	***** Verifikasi independen atas kepatuhan NDPE	NILAI AKHIR
	Y	P	N	N	N	N	P	N	N	N	F
	Y	N	N	N	N	N	P	N	N	P	F
	Y	P	N	N	N	N	N	N	N	N	F
	Y	P	N	P	N	N	P	N	N	N	D
	Y	N	P	N	N	N	P	N	N	N	F
	Y	P	N	P	P	N	P	N	N	N	D
	Y*	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F
	Y	P	P	N	N	P	P	N	N	P	D
	Y	N	N	N	N	N	P	N	N	N	F
	Y	Y	Y	P	N	P	P	P	P	P	C

	* Kebijakan NDPE	* Lingkup Kebijakan NDPE	* Mandat untuk Mengadopsi Kebijakan NDPE	* Rencana Implementasi NDPE	** Pengungkapan Jejak Hutan	*** Bukti Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan	*** Sistem pemantauan dan uji tuntas yang kuat	*** Nol toleransi untuk tindak kekerasan dan intimidasi	**** Meminta pertanggungjawaban perusahaan nakal	***** Verifikasi independen atas kepatuhan NDPE	NILAI AKHIR
	Y	Y	P	N	N	N	P	N	P	N	D
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F
	N	N	N	N	N	N	P	N	P	N	F
	Y	P	N	P	N	N	P	N	P	N	D
	N	N	N	N	N	N	P	N	N	N	F
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F
	Y	N	P	N	N	N	P	N	N	N	F

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Sudahkah mereka mengambil langkah pertama dalam mengadopsi kebijakan untuk menghentikan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia dari rantai pasok dan pembiayaan mereka?

Apakah mereka secara terbuka mengungkapkan dampak menyeluruh bisnis mereka terhadap hutan dan hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal?

Apakah mereka mencegah kekerasan dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dan adat sepenuhnya dihormati?

Apakah mereka benar-benar mengubah praktik pembelian atau pembiayaan jika mitra bisnis mereka ditemukan melanggar kebijakan terkait perlindungan hutan dan penegakkan hak asasi manusia?

Bisakah mereka membuktikan kepada pelanggan bahwa mitra bisnis mereka mematuhi kebijakan mereka?

RENTANG NILAI:

Y = 2

P = 1

N = 0

A = 18-20

B = 15-17

C = 12-14

D = 5-11

F = 0-4



# CATATAN PENTING & REKOMENDASI

Dibawah ini menunjukkan kinerja terburuk dari **17 perusahaan** yang dievaluasi:



Bank-bank dengan nilai “F”:

**BNI**

JPMORGAN CHASE & CO.

**CIMB BANK**

**MUFG**

**ICBC**



Merek-merek dengan nilai “F”:

**COLGATE-PALMOLIVE**

**Mondelēz**  
International

**FERRERO**

**NISSIN**

**KAO**

**P&G**

Evaluasi ini menemukan bahwa tidak satupun dari 17 merek dan bank besar yang mengambil tindakan memadai untuk mengatasi kontribusi mereka terhadap perusakan hutan, perampasan lahan, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang terus berlangsung, sejumlah bank dan merek bahkan memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan rekan-rekan mereka. **BNI, CIMB, ICBC, JPMorgan Chase, MUFG, Colgate-Palmolive, Ferrero, Kao, Mondelēz, Nissin Foods, dan Procter & Gamble** merupakan perusak hutan yang paling buruk.

Dari bank-bank yang dinilai, hanya bank Belanda **ABN Amro** dan **DBS** Singapura yang mengharuskan kebijakan dengan lingkup yang luas terhadap klien untuk berkomitmen pada persyaratan produksi terkemuka Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan Gambut and Nol Eksploitasi (NDPE), namun keduanya masih belum memiliki sistem untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dan benar-benar tercapai. **CIMB** dari Malaysia melakukan beberapa uji tuntas klien tetapi hanya mendorong klien untuk mengadopsi kebijakan NDPE alih-alih menjadikannya persyaratan. **BNI** dari Indonesia dan **ICBC** dari China mengungkapkan beberapa masalah keberlanjutan tetapi tidak merujuk pada persyaratan produksi NDPE. Bank Jepang **MUFG** baru-baru ini mengadopsi kebijakan NDPE untuk minyak sawit, tetapi belum mewajibkan standard yang sama untuk sektor lainnya seperti pulp dan kertas. **JPMorgan Chase** yang berbasis di AS juga baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk mengharuskan klien minyak sawit agar sejalan dengan persyaratan NDPE, namun ini tidak akan berlaku hingga September 2021.

Meskipun semua merek telah menerbitkan kebijakan NDPE, namun mereka semua terus gagal memenuhi komitmen ini. Tak satu pun dari merek yang dievaluasi telah menetapkan bagaimana dan kapan mereka akan melakukan verifikasi independen atas kinerja pemasok — yang sangat penting untuk membuktikan bahwa kebijakan NDPE terpenuhi. Membuat komitmen tidak cukup, perusahaan harus memiliki rencana terikat waktu untuk mengimplementasikan komitmen mereka. Semua merek, kecuali merek Jepang **Kao** dan **Nissin Foods**, telah menetapkan sistem pemantauan hutan. Sedangkan tanggapan merek terhadap kasus deforestasi saat ini masih bersifat ad hoc, kurang transparan, dan tidak mengikuti prosedur kepatuhan yang bisa diterima.

Yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tidak ada merek atau bank yang memiliki prosedur uji tuntas yang memadai terkait dengan HAM. Tidak ada pihak yang secara independen memverifikasi bahwa pemasok atau klien mereka mematuhi undang-undang, peraturan, atau praktik terbaik yang relevan pada proses Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Ini berarti bahwa merek dan bank tidak dapat mengidentifikasi, menghindari, atau memperbaiki pelanggaran HAM yang mungkin terkait dengan mereka.

Anak laki-laki dari Masyarakat Adat Aek Lung di Sumatera Utara, Indonesia, sedang menyaksikan tanahnya dibuka untuk perkebunan pulp dan kertas milik Toba Pulp Lestari / Royal Golden Eagle  
FOTO: Agusriady Saputra / RAN





Petani di Lubuk Mandarsah, Provinsi Jambi, Indonesia tengah berjuang untuk mendapatkan akses terhadap lahan yang sudah mereka miliki secara tradisional, namun kini telah dibuka oleh Asia Pulp and Paper/ Grup Sinar Mas.  
FOTO : Agusriady Saputra / RAN

### **Adopsi kebijakan 'Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan Gambut dan Nol Eksploitasi' (NDPE)**

- » Membuat rencana aksi untuk mencapai dan membuktikan implementasi
- » Adopsi penerapan kebijakan diwajibkan untuk semua mitra bisnis

### **Merilis Jejak Hutan**

- » Mengungkapkan secara publik dampak total mereka terhadap hutan, lahan gambut, dan hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal

### **Mencegah tindak kekerasan dan menjunjung HAM**

- » Menetapkan pemantauan hak asasi manusia, sistem uji tuntas dan metode berbasis lapangan untuk memverifikasi hak memberikan atau tidak memberikan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) agar dihormati
- » Menegakkan prosedur nol toleransi terhadap pelanggaran HAM untuk mencegah tindak kekerasan, kriminalisasi, intimidasi, dan pembunuhan pembela hak dan lahan

### **Bertanggung Jawab atas Perusahaan yang Nakal**

- » Membuat proses untuk mengakhiri hubungan dengan mitra bisnis yang terlibat deforestasi dan pelanggaran HAM

### **Membuktikan kepatuhan oleh mitra bisnis**

- » Mempublikasikan verifikasi independen atas kepatuhan terhadap NDPE
- » Tidak bergantung pada sistem sertifikasi yang tidak efektif





# PENUTUP

FOTO: Paul Hilton / RAN

Korporasi berikut rantai pasok mereka yang menjangkau secara luas, bersama dengan bank penyedia modal, telah mendorong deforestasi, mengabaikan hak atas tanah dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, sehingga memperburuk krisis iklim kita demi keuntungan paling cepat. Pandemi zoonosis saat ini semakin memperburuk ketidaksetaraan ras dan ekonomi global serta meningkatkan risiko bagi Masyarakat Adat dan lokal.

**Merek-merek dan bank-bank harus mengambil tindakan nyata untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan deforestasi lebih lanjut. Kami meminta mereka untuk Mempertahankan Tegakkan Hutan dan Menjunjung Hak-Hak Masyarakat Adat sekarang.**

---

## CATATAN AKHIR

- 1 Forest Peoples Programme. "[Forest Peoples: Numbers Across the World](#)" Forest Peoples Programme. 2012.
- 2 WRI. "[The IPCC Calls for Securing Community Land Rights to Fight Climate Change](#)" August 2019.
- 3 "[Commodities](#)" Global Forest Watch. 2020.
- 4 Manongdo, Ping. "[Why attacks on environment defenders should scare big business](#)". Eco-Business. 2019.
- 5 Frontiers in Veterinary Science, 24 March 2021, "[Outbreaks in vector-borne and zoonotic disease are associated with changes in forest cover and oil palm expansion at global scale](#)"; Emerging Infectious Diseases, November 2005, "[Bushmeat Hunting, Deforestation and Predication of Zoonotic Disease](#)"; Intergovernmental Council on Pandemic Prevention, November 2020, "[Escaping the 'Era of Pandemics'](#)"
- 6 Nissin Foods "[Group Policy on Sustainable procurement](#)" states it is "supporting the NDPE requirements' but lacks explicit NDPE requirements for suppliers to comply with. Further strengthening of its NDPE policy in accordance with recommendations provided by RAN is required.





**Rainforest Action Network**  
425 Bush Street, Suite 300 | San Francisco, CA 94108 | [RAN.org](http://RAN.org)

FOTO: Nanang Sujana / RAN  
TANGGAL PUBLIKASI: April 2021